

ANALISA RUANG LINGKUP INFORMASI KONTEKSTUAL

LAPORAN EITI 2012-2013

DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TIM TEKNIS 17 JUNI 2015

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required	Encouraged/ Recommended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
3.2	The EITI Report must describe the legal framework and fiscal regime governing the extractive industries.					
3.2.a	This information must include a summary description of the fiscal regime, including the level of fiscal devolution, an overview of the relevant laws and regulations, and information on the roles and responsibilities of the relevant government agencies.	X		IA memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai perubahan kebijakan di sektor industri ekstraktif. Sejumlah perubahan kebijakan di sektor industri ekstraktif perlu dijelaskan, misalnya: (i) Rencana revisi UU Migas, rencana revisi UU Minerba (ii) Perubahan KK menjadi IUP (iii) Kebijakan hilirisasi, bea keluar mineral mentah. (iv) Sistem lelang (v) Perubahan kewenangan berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemda & UU No. 2/2015 tentang penetapan Perppu (vi) Pembentukan sistem informasi Manajemen PNBPN Online Kemenkeu (vii) Korsup KPK (viii) Pelayanan satu pintu bidang investasi, perizinan, dll. (dari berapa tahap menjadi lebih sedikit tahap dst.) (ix) Pemberlakuan Ekspor Terdaftar Batubara, etc. Perlu membuat bagan alur penerimaan	IA dapat memberikan gambaran umum dalam <i>contextual information</i> mengenai Undang-Undang dan Peraturan terkait industri ekstraktif beserta kebijakan perpajakan seperti yang telah diuraikan dalam TOR.	Laporan EITI akan membahas reformasi/perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang meliputi isu-isu dengan referensi yang sudah tersedia di publik: • MOMI • NPM • Revisi UU Migas • Kebijakan satu pintu • Termasuk peraturan pelaksana UU 4/2009 tentang minerba mengenai peraturan lelang di sektor minerba.
3.2.b	Where the government is undertaking reforms, the multi-stakeholder group is encouraged to ensure that these are documented in the EITI Report.		X		• Materi pembahasan UU migas baru dapat merujuk pada materi /diskusi yang tersedia di publik • IA juga dapat membahas program pemerintah yang sedang berjalan: • One Map Policies • Modul Penerimaan Negara	

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required	Encouraged/ Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
3.3	Overview of the extractive industries					
3.3	The EITI Report should provide an overview of the extractive industries, including <u>any significant exploration activities</u> .	X		IA perlu menjelaskan situasi ketersediaan data proyeksi eksplorasi, <u>seperti memasukkan perkiraan produksi</u> . Alex: MSG could also consider including projections for production <u>(not required)</u> .	Migas: Sesuai pembahasan dengan SKK Migas IA akan membahas proyek <i>discovery</i> yang akan memasuki fase development.	Dalam hal kegiatan eksplorasi yang signifikan, rapat memutuskan: - definisi eksplorasi <u>signifikan</u> yaitu memiliki cadangan pasti yang terbukti dan memiliki peluang besar untuk memasuki tahapan eksploitasi - Migas: Pembahasan meliputi proyek yang sudah <i>discovery</i> dan akan memasuki tahapan eksploitasi (informasi yang disajikan dalam laporan termasuk: nama blok, nama sumur/field, dan jumlah cadangan – bukan produksi). Data tersebut untuk migas ada di Laporan Tahunan SKK Migas. - Minerba: data proyek eksplorasi hanya untuk PKP2B dan KK dapat diminta ke Direktorat Pengusahaan, ESDM.
3.4	The EITI Report must disclose, when available, information about the contribution of the extractive industries to the economy for the fiscal year covered by the EITI Report.					
3.4.a	Size of the extractive industries in absolute terms and as a percentage of GDP, including <u>an estimate of informal sector activity</u> .	X		Alex: Sources of estimated data on informal sector – KPK	Referensi mengenai kontribusi sektor informal dapat merujuk pada informasi publik jika tersedia.	Dalam hal kontribusi sektor informal, rapat memutuskan: Penjelasan kontribusi sektor informal dari sektor minerba disusun berdasarkan sumber data yang bisa didapatkan dari publikasi/kajian K/L; contoh kajian dari Korsup KPK (CSO akan membantu untuk memberikan kajian tersebut) atau instansi pemerintah dan lembaga riset lainnya; sebagai alternatif dapat digunakan kajian World Bank.

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required	Encouraged/ Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
						Tidak ada sektor informal untuk migas.
3.4.b	Total government revenues generated by the extractive industries (including taxes, royalties, bonuses, fees, and other payments) in absolute terms and as a percentage of total government - revenues.	X		Tidak ada komentar/saran yang masuk untuk poin ini	IA dapat melaporkan penerimaan negara baik dalam nilai absolut maupun persentasi dari total penerimaan.	Akan ditulis/dibahas sesuai dengan Standar EITI
3.4.c	Exports from the extractive industries in absolute terms and as a percentage of total exports	X		-	IA dapat melaporkan total ekspor dari industri ekstraktif dalam nilai absolut maupun persentasi dari total penerimaan.	
3.4.d	Employment in the extractive industries in absolute terms and as a percentage of the total employment.	X		IA dapat melihat data di website SKK Migas mengenai data pekerja lokal dan asing setiap tahunnya	IA dapat melaporkan jumlah tenaga kerja industri ekstraktif dalam nilai absolut maupun persentasi dari total penerimaan.	
3.4.e	Key regions/areas where production is concentrated	X			IA dapat melaporkan daerah konsentrasi produksi	
3.5	The EITI Report must disclose production data for the fiscal year covered by the EITI Report, including:					

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required Encouraged/Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
3.5.a	Total production volumes and the <u>value</u> of production by commodity, and <u>when relevant, by state/region.</u>	X	Penjelasan Inception Report harus mencakup data baik total volume, produksi, nilai, dan harga produksi ekspor. IA dapat menggunakan sejumlah referensi penting seperti International Crude-Oil Price yang merupakan rujukan resmi mendeskripsikan harga per jenis minyak. MSG harus memutuskan harga acuan yang akan dipakai per komoditas, dan memberikan rekomendasi kepada IA sumber mendapatkan data pada pemerintah terkait atau pemerintah lokal untuk volume produksi per komoditas per daerah. Membuka data spreadsheet PNBP bisa menyelesaikan masalah. Adanya perbedaan justru penting sebagai temuan. Gunakan disclaimer untuk menjelaskan perbedaan data, justru menjadi nilai lebih jika EITI Report dapat menemukan problem kritikal dalam perbedaan data dan merekomendasikan penyelesaiannya. Alex: Average pricing rather than reference prices NRGI: - The quantity of estimated proven reserves for each commodity - To enable comparisons, figures should be disclosed for the reporting years and at least one year prior Data on reserves is available in ESDM but it is considered confidential. Interestingly this available in some reports produced by private companies such as Petromindo.	- Nilai dari produksi dapat merujuk pada nilai rata-rata ekspor komoditas dibandingkan kewajarannya dengan harga pasar (London Metal Exchange) - Data produksi per daerah akan dikonfirmasi ke Ditjen Migas dan Ditjen Minerba	Dalam hal nilai produksi, rapat memutuskan: - Untuk migas volume produksi mengacu pada angka lifting - Patokan harga mengacu pada: - Batubara – Harga Batubara A - cuan (HBA) - Minyak – ICP - Gas – Nilai rata-rata dalam GSA - Komoditas mineral lainnya: rata-rata tahunan LME - Dibuat catatan dalam laporan EITI agar pembaca tidak menjadikan nilai produksi sebagai acuan untuk memperkirakan penerimaan negara. Hal ini untuk mencegah kesalahpahaman dari pembaca laporan karena penerimaan negara didasarkan pada volume penjualan atau lifting dan bukan berdasarkan produksi.

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required Encouraged/	Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
				IA perlu menjelaskan sejauh mungkin yang bisa dijelaskan mengenai besaran sektor informal ini, baik melalui data sekunder atau riset-riset yang tersedia.		
3.5.b	Total export volumes and the <u>value</u> of exports by commodity, and, when relevant, by state/region of origin.	X		Migas/Minerba – Template laporan diminta lebih detail hingga memberikan informasi mengenai hasil penjualan <u>minyak bagian pemerintah</u> termasuk didalamnya volume yang diekspor, <u>siapa pembelinya</u> , <u>harga yang diterima dan pasar tujuan</u> .	IA dapat melaporkan ekspor per komoditas.	Dalam hal penjualan minyak bagian pemerintah, rapat memutuskan: - Laporan mencakup penjelasan mengenai mekanisme penjualan migas bagian pemerintah dan peran Pertamina dalam prosesnya– referensi data ke SKK Migas - Tidak perlu menjabarkan pihak pembeli minyak bagian pemerintah dalam laporan EITI.
3.6	Where state participation in the extractive industries gives rise to material revenue payments, the EITI Report must include:					
3.6.a	An explanation of the prevailing rules and practices regarding the financial relationship between the government and state owned enterprises (SOEs), e.g. the rules and practices governing transfers of funds between the SOE(s) and the state, retained earnings, reinvestment and third-party financing.	X		IA perlu memberi penjelasan yang lengkap apakah ada bentuk – bentuk partisipasi pemerintah dengan BUMN, <u>seperti: (i) informasi perubahan kebijakan tentang crude trade dan procurement seperti Petral ke Integrated Supply Chain</u> ; (ii) Saham dividen saldo laba, produksi, pendanaan pihak ketiga.	IA dapat memberikan penjelasan mengenai kerangka hukum BUMN dan hubungannya dengan pemerintah pusat	Dalam hal ruang lingkup topik penerimaan negara dari BUMN, rapat memutuskan: - Laporan menjelaskan hubungan BUMN dengan Pemerintah. Misalnya perlakuan terhadap BUMN dibandingkan dengan perusahaan privat lainnya, mekanisme pembagian dividen, penjelasan dan struktur anak perusahaan. - Migas: PT Pertamina (Persero) yang dipaparkan dalam laporan: i) perlakuan yang sama dengan KKS yang lain ii) kepemilikan 100% Pemerintah iii) bagi hasil 60:40 iv) penjelasan
3.6.b	Disclosures from SOE(s) on their quasi-fiscal expenditures such as payments for social services, public infrastructure, fuel subsidies and national debt servicing. The multi-stakeholder group is required to develop a reporting process with a view to achieving a level	X		MSG perlu menyepakati apakah <u>subsidi BBM masuk dikategorikan sebagai quasi fiscal expenditure</u> yang biasanya dibayarkan melalui anggaran. Penting bahwa informasi subsidi BBM dapat dibuka dalam laporan	IA akan mengacu pada informasi laporan keuangan BUMN dan penjelasan langsung dari BUMN tersebut	

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required Encouraged/Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
	of transparency commensurate with other payments and revenue streams, and should include SOE subsidiaries and joint ventures.		NRGI: Information on Indonesia's SOEs in the scoping study should be complimented with additional detail on the rules and practices relating to: Corporate governance including members of the board and their appointment procedure and oversight mekanisme and auditing procedures. In addition to transfers from SOE to gov, the EITI report should include: • Contribution to operating and capital expenditures • Loan • In-kind transfer • Fund to pay fuel subsidies • The sale of gov's share of oil to traders should be reported on, including: volume, price, buyer, date and destination. Where possible this figure should be reconciled with trading companies • Fuel subsidies • MSG needs to provide recommendation to the IA to obtain data and information from individual SOEs, their subsidiaries and joint venture		kepemilikan anak perusahaan v) kaitan Pertamina Persero untuk penjualan bagian negara - Minerba: PT Timah, PT Antam PT Bukit Asam. Pemaparan dalam laporan konsisten dengan migas • Laporan menjelaskan mekanisme 10% <i>participating interest</i> dari BUMD • Laporan subsidi BUMN (2012-2013) dan setelah mendapatkan data dari Pertamina, angka subsidi BBM bisa dikonfirmasi ke Ditjen Anggaran. • Lebih lanjut rapat juga memutuskan untuk diadakan pemaparan dari 4 BUMN industri ekstraktif untuk menjelaskan hal terkait pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam Standar EITI 3.6 yaitu mengenai: praktek <i>quasi-fiscal expenditures</i>, kegiatan dan hubungan dengan anak perusahaan, perubahan penyertaan modal pemerintah, perubahan kepemilikan anak perusahaan, dan penyediaan infrastruktur publik.
3.6.c	Disclosures from the government and SOE(s) of their level of beneficial ownership in mining, oil and gas companies operating within the country's oil, gas and mining sector, including those held by SOE subsidiaries and joint ventures, and any changes in the level of ownership during	X	Alex: Are there any other transactions between extractives SOEs and government aside from extractives revenues		

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required Encouraged/	Recomm. ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
	the reporting period. This information should include details regarding the terms attached to their equity stake, including their level of responsibility to cover expenses at various phases of the project cycle, e.g. full-paid equity, free equity, carried interest. Where there have been changes in the level of government and SOE(s) ownership during the EITI reporting period, the government and SOE(s) are expected to disclose the terms of the transaction, including details regarding valuation and revenues. Where the government and SOE(s) have provided loans or loan guarantees to mining, oil and gas companies operating within the country, details on these transactions should be disclosed in the EITI Report.					
3.7	Distribution of revenues from the extractive industries					
3.7.a	The EITI Report should indicate which extractive industry revenues, whether cash or in-kind, are recorded in the national budget. Where revenues are not recorded in the national budget, the allocation of these revenues must be explained, with links provided to relevant financial reports as applicable, e.g. sovereign wealth and development funds, sub-national governments, state-owned companies, and other extra-budgetary entities.	X			IA dapat mengacu pada data LKPP dan APBN dan Scoping Study EY dan menyertakan link ke website (jika ada) seperti yang disyaratkan dalam standar ini.	Akan ditulis/dibahas sesuai dengan Standar EITI
3.7.b.	Multi-stakeholder groups are encouraged to reference national		X			

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required Encouraged/Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
	revenue classification systems, and international standards such as the IMF Government Finance Statistics Manual.				
3.8	The multi-stakeholder group is encouraged to include further information on revenue management and expenditures in the EITI Report, including				
3.8.a	A description of any extractive revenues earmarked for specific programmes or geographic regions. This should include a description of the methods for ensuring accountability and efficiency in their use.		X	- IA akan membahas alokasi tambahan dana dari migas untuk Aceh, Papua dan Papua Barat, dan alokasi 0.5% untuk pendidikan dasar di daerah. - Untuk program lainnya akan di konfirmasi ke Bapenas.	Dalam bagian pembahasan program <i>earmarked</i>, rapat memutuskan laporan EITI untuk membahas: - membahas alokasi tambahan dana dari migas untuk Aceh, Papua dan Papua Barat, dan alokasi 0.5% untuk pendidikan dasar di daerah. - Disebutkan juga peraturan/kebijakan khusus lokal di Kabupaten Brojonegoro (saat ini hanya tersedia informasi dari Kabupaten Brojonegoro) – penjelasan dari CSO
3.8.b.	A description of the country's budget and audit processes and links to the publicly available information on budgeting, expenditures and audit reports.		X	IA akan mengacu pada informasi publik yang tersedia dari institusi pemerintah seperti dari laman BPK dan Departemen Keuangan dan menyertakan link ke website seperti yang disarankan dalam standar EITI poin ini	
3.8.c	Timely information from the government that will further public understanding and debate around issues of revenue sustainability and resource dependence. This may include the assumptions underpinning forthcoming years in the budget cycle and relating to <u>projected production, commodity prices and revenue forecasts arising from the extractive industries and the proportion of future fiscal revenues expected to</u>		X	Alex: Budget assumptions for commodity prices - Migas : IA akan mendiskusikan tentang proses RAPBN yang memakai asumsi harga dan lifting migas untuk periode anggaran tahun berikutnya, juga kajian-kajian yang dilakukan oleh Dewan Energi Nasional - Minerba: IA akan melakukan	Dalam ruang lingkup topik mekanisme estimasi pendapatan dari industri ekstraktif, rapat memutuskan : - Laporan menjelaskan mengenai mekanisme estimasi/proyeksi terkait industri ekstraktif (misalnya estimasi produksi dan estimasi penerimaan negara) di dalam: - APBN; dan - MTBF/MTF (<i>Mid Term Budget</i>)

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required Encouraged/ Recommended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
	come from the extractive sector.			kunjungan untuk memperoleh akses dan memperoleh informasi lebih lanjut tentang estimasi produksi dan harga komoditas kepada Bapenas dan Ditjen Minerba.	<i>Framework / Mid Term Expenditure Framework</i> – sumber informasi: BKF
3.9	Information on the licencing process and register				
3.9.a	The term license in this context refers to any license, lease, title, permit, or concession by which the government confers on a company(ies) or individual(s) rights to explore or exploit oil, gas and/or mineral resources.		IA perlu menjelaskan ketersediaan data-data ini dan apapun diskrepansi dengan prakteknya di lapangan., atau masalah yang terjadi. Yang dikejar justru gambaran komprehensif, termasuk masalah yang terjadi.	- IA akan memberikan komentar atau rekomendasi tentang penerapan cadastre sistem di Indonesia. - Dalam laporan kontekstual akan disajikan wilayah kerja migas dan wilayah pertambangan minerba yang saat ini tersedia di publik.	Dalam ruang lingkup topik <i>licencing</i> , rapat memutuskan : - Laporan menjelaskan sistem tender apa adanya yang tersedia di publik dan informasi yang dapat dipublikasikan di publik – Sumber informasi: ESDM PPID - Lalu laporan menjelaskan <i>cadastre system</i> yang sedang diperbaiki dalam proyek MOMI - Laporan juga dapat menjelaskan an mengenai: i) perdebatan informasi koordinat yang tidak termasuk kategori informasi publik yang diputuskan dalam keputusan KIP ii) informasi koordinat termasuk dalam UU kerahasiaan negara – informasi mengenai perdebatan ini didapatkan dari CSO
3.9.b	Implementing countries are required to maintain a publicly available register or cadastre system(s) with the following timely and comprehensive information regarding each of the licenses pertaining to companies covered in the EITI Report: i. license holder(s); ii. coordinates of the license area; iii. date of application, date of award and duration of the license; and iv. in the case of production licenses, the commodity being produced. It is expected that the license register or cadastre includes information about licenses held by all entities, including companies and individuals or groups that are not included in the EITI Report, i.e. where their payments fall below the	X	Misalnya: - Data kadaster tersedia tetapi harus dibeli di dirjen minerba esdm. - Sebagian data mulai muncul di MOMI - Isu besar pemerintah daerah tidak memberikan semua data perizinan pada pemerintah pusat, sehingga menyulitkan pencatatan dan monitoring. Ada 2 regulasi yang menjadi dasar pembukaan data, perlu dijelaskan dalam informasi kontekstual: (i) Sesuai UU KIP 14/2008 pasal 10 tentang informasi yang menyangkut kepentingan publik. (ii) Keputusan adjudikasi Komite Informasi		

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required Encouraged/	Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
	agreed materiality threshold. Where there are significant legal or practical barriers preventing such comprehensive disclosure, this should be documented and explained in the EITI Report, including an account of government plans for seeking to overcome such barriers and the anticipated timescale for achieving them.			Pusat atas gugatan data kontrak dimana keputusan KIP menyebutkan informasi tsb. bisa dibuka. (iii) Inpres 7/2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi pasal 43 juga meminta ESDM mempublikasikan proyek MOMI. NRGI:		
3.9.c	Where the information set out in 3.9(b) above is already publicly available, it is sufficient to include a reference or link in the EITI Report. Where such registers or cadastral do not exist or are incomplete, the EITI Report should disclose any gaps in the publicly available information and document efforts to strengthen these systems. In the interim, the EITI Report itself should include the information set out in 3.9(b) above.	X		- The MSG should strongly recommended that information on licence holder, licence area, coordinates, reserves and commodity produced are disclosed in the EITI report including its link. - The MSG could refer to 14/2008 art. 10 on public interest to require this information. Presidential Instruction 7/20015 on prevention and eradication of corruption, art 43 also requires ESDM to expedite MOMI	IA dengan persetujuan Tim Transparansi akan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan <i>cadastral information</i> yang tersedia di publik	
3.10	Allocation of licenses					
3.10.a	Implementing countries are required to disclose information related to the award or <u>transfer</u> of licenses pertaining to the companies covered in the EITI Report, including: a description of the process for transferring or awarding the license; the technical and financial criteria used; information about the recipient(s) of the license that has been transferred or awarded, including consortium members where applicable; and any non-trivial deviations from the	X		IA harus menjelaskan secara rinci situasi proses pemberian izin, seperti: (i) Adanya data di MOMI untuk mengetahui letak koordinat; sementara izin produksi bisa dicari ke dirjen minerba. (ii) Data cadangan ada di ESDM tapi dianggap rahasia. (iii) Namun menariknya tampil di beberapa laporan yang diterbitkan	- Migas – Ditjen Migas akan memberikan daftar perpindahan pemilik participating interest dan pemberian kontrak baru tahun 2012-2013 beserta peserta tender. - Minerba – Tidak ada tender dalam tahun 2012-2013	Dalam ruang lingkup topik pemberian dan transfer izin/interest, rapat memutuskan: - Laporan cukup menjelaskan mengenai proses/mechanisme pemberian kontrak/ijin dan transfer kepemilikan yang berlaku - Proses publikasi pemenang award termasuk link informasi pemenang award. Daftar pemenang tender tidak perlu dipublikasikan dalam laporan.

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required	Encouraged/ Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
	applicable legal and regulatory framework governing license transfers and awards.			perusahaan swasta seperti Petromindo.		- Cukup menjelaskan proses/mekanisme transfer <i>interest</i>. Penjelasan ini hanya untuk migas dan tidak ada untuk minerba. - Migas: Kriteria <i>bidding</i> dapat dipaparkan. Keperluan publikasi peserta lelang harus dikonfirmasi dengan bagian hukum dan kebijakan yang ada, rapat menyarankan untuk tidak mempublikasikan secara detail peserta lelang. - Minerba: Tidak ada lelang.
3.10.b	Where licenses are awarded through a bidding process during the accounting period covered by the EITI Report, the government is required to disclose <u>the list of applicants and the bid criteria</u> .	X		(iv) Data cadangan harus dibeli perusahaan yang ikut proses lelang sebagai syarat lelang. (v) Apakah data pengikut bidding bisa diakses atau tidak. NRGI: - Oil and gas scoping study provides a description of award process but does not specify whether the list of applicants and bid criteria, technical and financial criteria, non-trivial deviations and recipients information will be disclosed. Since this information is required in the new EITI standard, the MSG should provide recommendation to the IA to obtain these data from ESDM and SKK migas - For coal and mineral licensing, the EITI report should also cover the list of applicants and bid criteria, non-trivial deviations and recipient information. The MSG should recommend IA to obtain this information from ESDM (DG coal and mineral) - Contextual information on mineral licensing process should also refer to the ongoing reform led by KPK in mining sector (licensing) and current challenges including large number of licenses which don't meet CnC	- Migas : Ditjen migas akan memberikan daftar peserta tender - Minerba: Tidak ada tender untuk tahun 2012-2013 (monotarium)	
3.10.c	Where the requisite information set out in 3.10(a) and 3.10(b) above is already publicly available, it is sufficient to include a reference or link in the EITI Report	X			IA dapat memberikan referensi atau tautan sumber informasi mengenai alokasi lisensi	
3.10.d	The multi-stakeholder group may wish to include additional information on the allocation of licenses in the EITI Report, including commentary on the efficiency and effectiveness of these systems		X		IA akan mendiskusikan dengan Tim Transparansi mengenai komentar Tim Transparansi seperti yang diisyatkan standar EITI poin 3.10.d	
3.11	Beneficial Ownership					

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required	Encouraged/ Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
3.11.a	It is <u>recommended</u> that implementing countries maintain a publicly available register of the beneficial owners of the corporate entity(ies) that bid for, operate or invest in extractive assets, including the identity(ies) of their beneficial owner(s) and the level of ownership. Where this information is already publicly available, e.g. through filing to corporate regulators and stock exchanges, the EITI Report should include guidance on how to access this information.		X	Jelaskan bagaimana ketersediaan data ini atau regulatory framework terkait data ini, seperti misalnya: tersedia di Kemhukam tetapi harus dibeli. Bisa dijelaskan ada contoh atau hasil riset terkait yang menjelaskan hal ini. NRGI: In addition to shareholder information, reporting template should require companies to disclose names of ultimate natural person benefecial owner(s) as well as: - For non-shareholder owners, a brief description of other means of ownership or control - Date of birth and nationality - Any nominee or bareer shareholdings	Saat ini beneficial ownership akan dilaporkan sesuai dengan isian pemilik izin/kontrak sesuai yang dilaporkan dalam formulir pelaporan rekonsiliasi	Dalam ruang lingkup topik <i>beneficial ownership</i> , rapat memutuskan: Laporan menjelaskan mengenai praktek dan sistem kesedian data <i>beneficial ownership</i> (seperti data yang dapat didapatkan di Kementerian Hukum dan HAM).
3.11.b	Where such registers do not exist or are incomplete, it is recommended that implementing countries request companies participating in the EITI process provide this information for inclusion in the EITI Report		X		Rapat tim pelaksana 12 Juni 2015 telah memutuskan untuk saat ini pertanyaan beneficial ownership cukup berdasarkan kepemilikan saham perusahaan.	
3.11.c	It is required that the government and/or state owned enterprises disclose their level of beneficial ownership in oil, gas and mining companies operating within the country, and any changes in the level of ownership during the accounting period covered by the EITI Report (Requirement 3.6(c))	X			IA akan merujuk kepada laporan keuangan konsolidasi perusahaan BUMN	
3.11.d	Definisi <i>beneficial ownership</i> .				N/A	
3.12	Contracts					
3.12.a	Implementing countries are encouraged to publicly disclose any contracts and		X	Meskipun standar pembukaan informasi kontrak masuk kategori didorong, namun IA	IA akan menyajikan ketentuan-ketentuan standar kontrak PSC	Dalam hal ruang lingkup topik kontrak,

Req. No.:	Ketentuan EITI	Required Encouraged/Recomm.ended	Komentar/Saran yang masuk	Komentar IA per 12 June 2015	Ruang Lingkup yang disetujui dalam rapat Tim Teknis 17 Juni 2015
	licenses that provide the terms attached to the exploitation of oil, gas and minerals.			dan IUP dalam Laporan Kontekstual	rapat memutuskan: Laporan mempublikasikan <u>ketentuan umum</u> dalam kontrak/izin. Sumber informasi:
3.12.b	It is a requirement that the EITI Report documents the government's policy on disclosure of contracts and licenses that govern the exploration and exploitation of oil, gas and minerals. This should include relevant legal provisions, actual disclosure practices and any reforms that are planned or underway. Where applicable, the EITI Report should provide an overview of the contracts and licenses that are publicly available, and include a reference or link to the location where these are published.	X	dapat memberikan penjelasan mengenai: (i) Framework regulasi yang tersedia yang berkaitan dengan data kontrak (ii) Praktek transparansi yang terjadi (iii) Reformasi yang sudah terjadi atau sedang terjadi (iv) Jika memungkinkan, jelaskan contoh kasus-kasus izin atau kontrak yang tersedia atau bisa diakses publik dan apa dampaknya ketika kontrak dibuka. NRGI: - Is there any law prohibiting such disclosure - The MSG should consider the significant benefits of contract disclosure. As starting point it could consult with relevant government and company representatives to devise a plan in publishing contract	IA akan membahas kebijakan pemerintah mengenai keterbukaan maupun pembatasan informasi publik mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak.	1) Migas - SKK Migas 2) Minerba – ESDM Pusdatin - Jika data umum kontrak tersedia di publik dimasukan link informasi tersebut - Penjelasan mengenai <i>framework</i> regulasi yang terkait dengan data kontrak (misalnya kontrak yang terbuka sebagian)– keputusan KIP. Sumber informasi: CSO - Perlu juga ditambahkan informasi (disclaimer) bahwa walaupun ada UU Keterbukaan Publik, tetapi terdapat beberapa klasifikasi data-data yang memang sifatnya rahasia dan diatur oleh KIP (Komisi Informasi Publik). Maka untuk data yang terlalu spesifik biasanya dilindungi UU Kerahasiaan Negara dan mesti dikonfirmasi lagi ke KIP. IA dapat meminta keterangan dari ESDM Pusdatin.
3.12.c	Contract definition				
3.12.d	License term definition				

Catatan: Rapat ini membahas ruang lingkup laporan kontekstual berdasarkan komentar/saran yang masuk dari Inception Report agar dapat dijadikan acuan untuk pekerjaan IA. Pembahasan lebih lanjut akan diperlukan berdasarkan temuan-temuan dari informasi-informasi yang tersedia dalam proses pembuatan laporan kontekstual.